MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI SUMATERA SELATAN

Adli[1]; Leti Karmila[2];
Universitas Sumatera Selatan[1, 2];
E-mail: *adlimsc@uss.ac.id[1]; leti.karmila@uss.ac.id[2]*

Abstrak

Proses komunikasi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan yang berulang dilakukan dengan menyampaikan informasi-informasi terkait dampak kebakaran serta pencegahannya. Proses komunikasi bencana serta skema pencegahannya telah direncanakan, namun kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan masih saja berulang, sehingga perlu dikaji kembali langkah-langkah komunikasi bencana yang telah ditempuh. Manajemen komunikasi bencana selalu dibutuhkan baik dalam dalam kondisi darurat maupun pasca bencana. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mendeskripsikan manajemen komunikasi bencana dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi evaluatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur manajemen komunikasi bencana yang digunakan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan terdiri perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kata kunci: Manajemen Komunikasi, Kebakaran, Lahan gambut.

Abstract

The communication process to prevent repeated land fires is carried out by conveying information about the impact of fires and their prevention. The disaster communication process and prevention scheme have been planned. However, peatland fires in South Sumatra are still recurring, so it is necessary to review the disaster communication steps that have been taken. Disaster communication management is always needed both in emergency and post-disaster conditions. This study aims to evaluate and describe disaster communication management in preventing peatland fires in South Sumatra. This study uses a qualitative method with an evaluative study approach. Collecting data was done using interviews, observations, and documentation studies. Data analysis in this study used an interactive analysis model. The results of this study indicate that the elements of disaster communication management used in efforts to prevent peatland fires in South Sumatra consist of planning, organizing, implementing, and evaluating.

Keywords: *Communication Management, Fire, Peatland.*

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa. Luas wilayah kurang lebih 9,2 juta hektar dimana 3,4 juta hektar berupa hutan dan 1,3 juta hektar adalah lahan gambut.[1] Sumatera Selatan merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki lahan rawa. Setidaknya terdapat lahan rawa seluas 87.017 km2 yang tersebar di daerah bagian timur, mulai dari kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKI, Muara Enim, dan Banyuasin. Menurut Direktorat Jenderal Pengairan (1998), lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1.602.490 ha, terdiri atas lahan rawa pasang surut 961.000 ha dan rawa non pasang surut atau lebak 641.490 ha. Sebagian besar lahan rawa tersebut atau sekitar 1,42 juta Ha merupakan lahan rawa gambut.[2] Saat ini, hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia di Indonesia.[3]

Kebakaran lahan gambut memiliki banyak faktor. Kerusakan lahan gambut dapat terjadi akibat dari alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan hutan produksi dapat mengancam ekosistem hutan rawa gambut alami. Juga diakibatkan oleh adanya pembangunan sistem drainase yang tidak terkendali. Akibatnya *subsidence* dan lahan gambut kering bersifat *irreversible* atau tidak dapat kembali seperti semula. Sistem drainase inilah yang dapat menyebabkan pengeringan/oksidasi gambut atau *dekomposisi aerob* yang menghasilkan emisi gas CO2 sehingga beresiko terjadinya kebakaran. Risiko atas kebakaran lahan gambut ini dapat menyebabkan bencana asap. Penanganan bencana asap melibatkan banyak komponen lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menjalankan misi supaya dapat ditangani secara tepat. Kerjasama ini perlu adanya manajemen komunikasi bencana yang baik sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Seperti penyampaian informasi yang tepat

[1] Http://incas.menlhk.go.id/id/data/southsumatera, 2015

[2] Zulfikar, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut dengan Pola KPH di Propinsi Sumatera Selatan," in *Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman*, Yogyakarta, 2006.

[3] I. Lubis, "Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Dipandang dari Aspek Konservasi : Pengalaman Kegiatan CCFPI di Sumatera Selatan," in *Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanam*, Yogyakarta, 2006.

berpengaruh pada langkah-langkah yang dilakukan sebagai bagian dari mitigasi bencana yang benar.

Di Sumatera Selatan setidaknya setiap tahunnya mengalami kebakaran lahan gambut di berbagai wilayah. Kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015. Namun, pentingnya peran komunikasi bencana memberikan dampak yang tidak kecil. Setelah 2015, Sumatera Selatan sempat menunjukan perkembangan signifikan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pada 2018, hutan dan lahan gambut hanya terbakar sekitar 16.226, 60 hektar. Namun pada 2019 melesat hingga 336.778 hektar. Kabupaten OKI tetap menjadi paling luas mengalami kebakaran lahan gambut.[4]

Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan penerimaan pesan dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pascabencana.[5] Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengamati dan menganalisis bencana dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, evakuasi, rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan termasuk salah satu area yang rawan mengalami kebakaran lahan gambut sehingga perlu adanya upaya untuk membuat manajemen komunikasi bencana agar tidak terjadi kebakaran lahan gambut yang tentunya dapat merugikan ekosistem sekitar lingkungan lahan gambut. Selain itu, dapat merugikan masyarakat dengan dampak-dampak kebakaran yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut.

Manajemen komunikasi bencana terutama terkait komunikasi dalam pencegahan kebakaran lahan termasuk isu yang masih perlu dikaji, mengingat isu kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bencana tahunan yang kerap terjadi di setiap musim kemarau. Meskipun penelitian komunikasi bencana telah banyak dilakukan, namun yang spesifik membahas tentang pencegahan kebakaran lahan gambut masih sangat sedikit jumlahnya terutama di Sumatera Selatan. Oleh karena

---

[4] "MONGABAY," (Online). Available: http:www.mongabay.co.id. (Accessed 24 10 2020).

[5] A. P. d. A. W. Puji Lestari, "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 10, hal. 173-197, 2012.

itu, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi manajemen komunikasi bencana dalam rangka pencegahan kebakaran lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam mengevaluasi kebijakan terutama tentang komunikasi bencana dalam pencegahan kebakaran lahan.

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Komunikasi Bencana

Manajemen Komunikasi Bencana adalah pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi atau koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penangan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. *Asian Disaster Preparedness Center* dalam Adiyoso mengatakan manajemen bencana sebagai organisasi yang efektif, panduan, pemanfaatan sumber daya untuk mencegah bencana.[6]

Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana dan pascabencana.[7] Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan bencana. Manajemen bencana seharusnya mencakup komponen *mitigation, preparedness, response* dan *recover*y, selain itu terdapat aspek penting yang perlu menjadi perhatian yaitu informasi, koordinasi dan kerjasama. Sistem komunikasi yang perlu tahap pemulihan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah sebagai pusat koordinasi dan informasi, pihak swasta, LSM atau Organisasi sejenis berguna sebagai pendukung pemerintah kemudian media sebagai pihak yang membantu

[6] Galih Razuna Alghifari, Manajemen Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, JOM FISIP, Vol.7, No.1, hal 1-15. 2020.

[7] A. P. d. A. W. Puji Lestari, "Manajemen Komunikasi Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat," *Jurnal Ilmu Komunikasi ,* Vol. 10, No. 2, hal. 177, 2012.

pemerintah dalam mengatur arus informasi dan masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan sistem yang dibuat.[8]

2. Lahan gambut

Gambut didefinisikan sebagai tanah yang jenuh air dan tersusun dari bahan tanah organic berupa sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik.[9] Karakteristik gambut berdasarkan proses awal pembentukannya sangat ditentukan oleh unsur –unsur berikut: (1) Jenis tumbuhan (evolusi pertumbuhan *flora*), seperti lumut (*moss*), rumput *(herbaceous*) dan kayu (*wood*), (2) Proses humifikasi (suhu/iklim), dan (3) Lingkungan pengendapan *(paleogeografi*). Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu/arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali.[10]

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Alur penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menggali informasi dari komponen/kelompok tertentu yang memiliki peran dalam mengorganisir komunikasi bencana dalam pencegahan kebakaran lahan gambut. Proses penggalian informasi ini dilakukan sampai pada jumlah yang memadai dan mendapatkan kejenuhan data. Subyek dalam penelitian ini yaitu Badan Nasional Penanggulan Bencana Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. BPBD ini merupakan badan yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan

[8] C. U. Fetty Arisandi, "Komunikasi Bencana Sebagai Sebuah Sistem Penanganan Bencana Di Indonesia," *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi ,* Vol. 3, No. 1, hal. 25-37, 2019.

[9] J. H. Yus Rusila Noor, Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia, Bogor: Wetlands International- Indonesia Programme, 2007.

[10] F. d. I. M. S. Agus, Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan, Bogor: Balai Penelitian Tanah dan ICRAF, 2008.

dan penyelamatan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan mereka tidak hanya melakukan penanggulangan bencana, tetapi juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemulihan pasca bencana. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara analisis data interaktif yaitu mengkonfirmasi pada informan kunci. Adapun metode analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

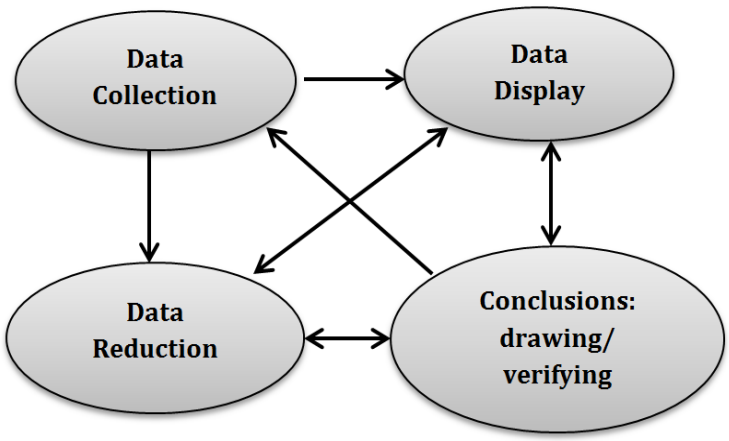

Gambar 1. *Analysis Interactive Models* dari Miles dan Huberman.[11]

Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Durasi pengumpulan data selama 6 bulan (April-September) dengan melibatkan BPBD provinsi Sumatera Selatan, BPBD kabupaten Banyuasin dan BPBD Ogan Komering Ilir. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan reduksi data guna menyeleksi data yang telah diperoleh melalui tiga metode tersebut. Kemudian data-data yang telah ditelaah melalui proses reduksi, data tersebut akan disajikan secara naratif. Penyajian data naratif ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan verifikasi data. Setelah selesai melakukan semua langkah tersebut, peneliti kemudian baru akan menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

[11] Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling," *Journal of Nonformal Education,* Vol. II, No. 1, hal. 91-98, 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kebakaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai negara tropis yang rentan akan bencana, Indonesia selalu harus waspada dan siap untuk penanganan bencana. Penanganan yang bersifat tanggap darurat menjadi prioritas utama untuk menekan jatuhnya korban jiwa. Sehingga kebutuhan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dijangkau sangat diperlukan untuk membantu penanganan bencana secara menyeluruh. Hal ini terkait dengan manajemen komunikasi bencana, dimana dimulai dari perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan, serta evaluasi terhadap penanggulangan bencana, terutama saat tanggap darurat.[12]

Sumatera Selatan salah satu provinsi yang sering mengalami bencana terutama kebakaran hutan lahan gambut. Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas mencapai 1.270.421 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 638.379 Ha, Banyuasin 303.350 Ha, Musi Banyuasin 254.050 Ha, Musi Rawas Utara 28.034, Muara Enim 21.860, Pali 19.771 dan Musi Rawas 4.977 Ha. Kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu keadaan bencana dimana hutan dan atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan Kesehatan.[13] Bencana kebakaran hutan dan lahan ini kerap terjadi musiman atau pada bulan-bulan tertentu. Berikut data kebakaran lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel 1. Data Kebakaran Hutan Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Luas (Ha)
1	2019	328 hektare
2	2020	268 hektare
3	2021	96,66 hektare

Sumber https://nusantara.rmol.id[14]

[12] A. P. d. A. W. Puji Lestari, "Manajemen Komunikasi Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat," *Jurnal Komunikasi* , Vol. 10, No. 2, hal. 177, 2012.

[13] Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor Tahun 2016)

[14] Trianto, D. (2021, 8 2). *nusantara.rmol.id*. Retrieved 9 17, 2021, from https://nusantara.rmol.id/read/2021/08/02/498864/90-hektare-lahan-di-sumsel-terbakar-selama-2021.

Data diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya, Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Seperti pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang paling besar terjadi dibandingkan tahun 2020 yang mulai mengalami penurunan dan juga di tahun 2021. Menurut hasil laporan posko satuan tugas tanggap darurat bencana asap, kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan dipicu karena adanya aktivitas pembakaran oleh masyarakat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kebakaran yang disengaja oleh manusia berupa: 1) Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembukaan areal perkebunan, pertanian dan tambak serta penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. 2) Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, mereka dalam memadamkan api dapat menimbulkan kebakaran. Pembakaran lahan oleh masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak atas lahan. misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, petani "sonor" dan pencari ikan di dalam hutan, keteledoran mereka dalam memadamkan api dapat menimbulkan kebakaran. 3) Pembakaran lahan oleh masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak atas lahan.

2. Manajemen Komunikasi Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Sumatera Selatan

Manajemen komunikasi juga bisa diartikan sebagai suatu perencanaan yang sistematis, penerapan, pemantauan, serta revisi dari seluruh saluran komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi dan juga antar organisasi yang mencakup organisasi serta penyebaran instruksi pada komunikasi baru yang tersambung dengan jaringan, organisasi atau suatu teknologi komunikasi.[15] Manajemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Ketika interaksi sosial di dalam manajemen itu terhambat, menjadi penghalang bagi tujuan dari manajemen tersebut.

[15] Friska Marina, P. M. (2021). Komunikasi Bencana BPBD Nagan Raya pada situasi terdapat potensi bencana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi,* Vol.1, No.1. Maret (2021): 14-22.

Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, melalui kebijakan Gubernur Sumatera Selatan telah dilakukan berbagai program dan kegiatan, baik pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, maupun regulasi terhadap penggunaan atau tata kelola lahan, khususnya lahan gambut. BPBD Sumatera Selatan untuk menghadapi terjadi kebakaran Hutan membuat Posko Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021. Adapun unsur yang tergabung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Manggala Agni, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Kab/Kota, TNI AU, AL dan AD, Polda Sumatera Selatan, Badan SAR. Adapun manajemen komunikasi bencana yang digunakan oleh badan penanggulangan bencana daerah meliputi;

a. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen merupakan suatu tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana di BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan manajemen yang mempunyai peranan serta saling menunjang adanya proses di dalam kegiatan. Komunikasi menjadi dasar kerja sama, saling berinteraksi, menebarkan pengaruh dalam organisasi. Komunikasi yang baik akan mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebelum melakukan kegiatan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahap awal yang dilakukan yakni akan mengadakan rapat dengan unsur *stakeholder* terkait guna membahas persiapan tanggap bencana kebakaran hutan dan lahan dalam kegiatan tersebut diadakan rapat bersama untuk berkoordinasi menyusun dokumen rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan, yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Manggala Agni, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Kab/Kota, TNI AU, AL dan AD, Polda Sumatera Selatan, Badan SAR serta akademisi dari Universitas Sriwijaya selaku pembicara pada acara tersebut. Tujuan dari kegiatan tersebut Menurut Edi selaku narasumber bahwa;

> "Yakni untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BNPB jauh-jauh hari sebelum terjadi kebakaran sudah mengantisipasi dan membuat program apa

saja yang akan dilakukan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini"

Hasil temuan data di lapangan peneliti melihat langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh BPBD sebagai berikut: Kegiatan kesiapsiagaan dimulai dengan menetapkan status siaga darurat, berdasarkan prakiraan cuaca sudah mulai memasuki musim kemarau oleh BMKG, membuat surat edaran untuk Kabupaten/Kota yang rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan upaya pengendalian KARHUTLA sedini mungkin, membuat dan menyebarluaskan "Maklumat" tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta ancaman hukuman kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Proses ini menjadi dasar untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama upaya pencegahan bencana.

Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, melalui kebijakan Gubernur Sumatera Selatan telah dilakukan berbagai program dan kegiatan, baik pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, maupun regulasi terhadap penggunaan atau tata kelola lahan, khususnya lahan gambut. Upaya pencegahan dilakukan mulai dengan pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi atau kampanye kepedulian terhadap lingkungan, utamanya untuk tidak membuka lahan dengan membakar, kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Organisasi pemerintah daerah (OPD) Sumatera Selatan, instansi vertikal terkait, serta dunia usaha yang bergerak dibidang kehutanan, perkebunan dan pertanian, termasuk TNI dan Polri sampai jajaran terendah.[16]

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian *(Organizing)* yaitu suatu fungsi yang dijalankan berupa cara pengaturan dari sekian banyak pekerjaan yang perlu dilakukan disesuaikan dengan sumber daya yang ada guna tercipta efisiensi di dalam bekerja dalam upaya pencapaian tujuan.[17] Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, BNPB Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya pengorganisasian proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membuat struktur Posko Satuan Tugas Siaga

[16] Selatan, B. S. (2019). *Laporan posko satuan tugas tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Selatan tahun 2019* .

[17] Hasmawati, F. (2018). Manajemen dalam komunikasi. *Al-Idarah*, hal. 76-86.

Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 044 Garuda Dempo selaku satgas dan membawahi 5 (lima) Sub Satgas yang terdiri dari :

1) Sub Satgas Operasi Darat Pelaksanaan Operasi Pemadaman Darat dipimpin oleh Kasi Ops Korem 044 Garuda Dempo Tugas Pokok Sub Satgas Darat dengan perbuatannya melaksanakan operasi pemadaman darat.
2) Sub Satgas Operasi Udara Pelaksanaan Operasi Pemadaman Udara dipimpin oleh dan Sub Satgas Operasi Udara, yaitu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara SMH Palembang. Sub Satgas Operasi Udara melaksanakan tugas untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan operasi pemadaman udara melalui helikopter atau pesawat dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan.
3) Sub Satgas Operasi Penegakan Hukum Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel.
4) Sub Satgas Sosialisasi Kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan selain dilaksanakan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau dilaksanakan saat mulai masuk musim kemarau, juga dilaksanakan oleh tim pemadaman darat di sekitar lokasi posko pemadaman darat.
5) Sub Satgas Kesehatan Masyarakat. Sub-Satgas Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Pelayanan Kesehatan dan Trauma Center BPBD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke Posko-posko Pemadaman darat yang ada untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas posko dan masyarakat sekitar posko, juga melakukan koordinasi dengan pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah kebakaran hutan dan lahan untuk memperoleh informasi dan permasalahan kesehatan yang ada, khususnya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. mengakibatkan adanya kabut asap cukup berdampak terhadap tingkat kasus Infeksi Pernapasan Akut.[18]

[18] BPBD. Laporan posko satuan tugas tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Semua sub satgas disini kemudian membangun koordinasi dan komunikasi guna tercapainya tujuan kegiatan dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. BPBD Sumatera Selatan membuat perencanaan bersama dengan satuan tugas tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Lembaga ini ikut melakukan kegiatan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan kebakaran hutan dan lahan yang diikuti oleh seluruh OPD, Instansi dan *stakeholder* terkait. diikuti dengan komitmen untuk berperan serta aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui berbagai kegiatan berupa pendirian posko pemadaman dini, di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, oleh personil gabungan, maupun posko pemadaman perusahaan hutan dan perkebunan, juga dilaksanakan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan selain upaya pencegahan dan kesiapsiagaan juga dilaksanakan upaya pemadaman, baik pemadaman darat, maupun udara dengan menggunakan helikopter, selain pemadaman, upaya represif juga dilakukan dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Subsatgas Penegakan Hukum (Gakkum), upaya shock terapi dengan memasang *"police line*" pada area yang terbakar dan memeriksa pemilik lahan.

Pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran lahan gambut juga di lokasi oleh komunitas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Desa Peduli Api (DPA). Kelompok ini mendapatkan pembinaan langsung dari BPBD kabupaten/ kota terutama dalam sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan pemadaman jika terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan ini merupakan pendekatan komunikasi partisipatif yang melibatkan SDM lokal untuk memberi pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat sekitar tersebut. Disamping itu dari hasil wawancara dengan tim BPBD dari Kabupaten OKI, pelaksanaan kampanye pencegahan kebakaran lahan dengan mengedukasi kelompok

masyarakat tentang cara pembukaan lahan dan tata cara pembakarannya yang tidak berdampak meluas.

d. Media

Pada saat tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, manajemen komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dari sebelum terjadi sampai dengan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan BPBD Sumatera Selatan. Kegiatan koordinasi dengan Tim satgas kebakaran hutan dan lahan selain kepada pemerintah, informasi mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi langsung disebarkan melalui berbagai media massa seperti radio, televisi lokal dan nasional, spanduk himbauan bahaya jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan ini guna mengatasi tanggap darurat, semua elemen penyiaran langsung bertindak sesuai amanat PP Nomor 50 tahun 2005, bahwa semua lembaga penyiaran harus segera memberi informasi kepada masyarakat terkait bencana alam yang terjadi.

Gambar 2. Sosialisasi cegah kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan selain dilaksanakan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau dilaksanakan saat mulai akan masuk musim kemarau. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pencegahan BPBD Sumsel, pelaksanaan upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi lewat media massa, radio, serta memasang rambu-rambu di setiap kabupaten/ kota. Sosialisasi ini tidak saja dilakukan oleh bpbd saja, namun juga dilakukan oleh OPD terkait seperti dinas kehutanan dan perkebunan, TNI-POLRI, lingkungan hidup, dan lain-lain.

e. Evaluasi

Secara umum manajemen komunikasi bencana kebakaran lahan gambut sudah berjalan dengan baik, sudah ada perencanaan yaitu Rencana *Contingency*, pelaksanaan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan media baik media massa, internet, dan media tradisional. Kekurangan dan hambatan merupakan hal yang wajar yang ditemukan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan evaluasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sosialisasi yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran dan lahan.

BPBD Sumatera Selatan melakukan kegiatan evaluasi berkala dan per kegiatan, baik mingguan, bulanan dan kegiatan evaluasi tahunan yang selanjutnya menjadi agenda tindak lanjut yang kemudian menjadi masukan dalam rencana kontijensi yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim BPBD Kabupaten Banyuasin,salah satu alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat sosialisasi pencegahan disebabkan oleh faktor minimnya anggaran. Komunikasi penanggulangan bencana terutama dalam upaya pencegahan lahan gambut di Sumatera Selatan telah menerapkan manajemen komunikasi penanggulangan bencana yang partisipatif, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

KESIMPULAN

Manajemen komunikasi bencana yang telah dilaksanakan oleh BPBD Sumatera Selatan telah dapat memberikan informasi yang memadai dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut. Proses ini dapat dilihat dari unsur-unsur manajemen komunikasi bencana yang dimulai dari perencanaan pencegahan, peorganisasian tim yang terlibat dalam proses pencegahan, pelaksanaan upaya pencegahan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun menggunakan media massa dan media sosial, serta kegiatan lain yang mendukung, dan yang terakhir kegiatan evaluasi yang yang dilakukan oleh BPBD baik pada kegiatan, mingguan, dan bulanan. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal, namun kendala yang masih menjadi tantangan bagi tim adalah mengupayakan pemilik lahan paham terhadap dampak daripada asap sehingga

mengurangi pembakaran meski atas dasar lahan milik pribadi. Menariknya, pada salah satu yang teliti, terdapat komunitas Desa Peduli Api (DPA) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Komunitas ini termasuk kelompok yang sangat berperan dalam menyebarkan pesan-pesan dan informasi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. P. d. A. W. Puji Lestari, "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat," *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 10. No. 2(2012): 173-197.

Galih Razuna Alghifari. "Manajemen Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar". JOM FISIP, Vol.7, No.1 (2012): 1-15.

C. U. Fetty Arisandi, "Komunikasi Bencana Sebagai Sebuah Sistem Penanganan Bencana Di Indonesia," *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi* , Vol. 3, No. 1(2019): 25-37.

Hasmawati, F. "Manajemen dalam komunikasi". Jurnal *Al-Idarah,* Vol.5. No. 6(2018): 76-86.

S, E., & Yasir. "Manajemen Komunikasi badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar". *JOM FISIP*,Vol.7, No. 1(2018): 1-13.

Friska Marina, P. M. (2021). "Komunikasi Bencana BPBD Nagan Raya pada situasi terdapat potensi bencana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi,* Vol.1, No.1. Maret (2021): 14-22.

Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling," *Journal of Nonformal Education,* Vol. II, No. 1(2016): 91-98.

Zulfikar, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut dengan Pola KPH di Propinsi Sumatera Selatan", *Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman*, Yogyakarta, 2006.

I. Lubis, "Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Dipandang dari Aspek Konservasi : Pengalaman Kegiatan CCFPI di Sumatera Selatan", *Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu". Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanam*, Yogyakarta, 2006.

Selatan, B. S. *Laporan posko satuan tugas tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.* Palembang, (2019).

J. H. Yus Rusila Noor, Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia, Bogor: Wetlands International- Indonesia Programme, 2007.

F. d. I. M. S. Agus, Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan, Bogor: Balai Penelitian Tanah dan ICRAF , 2008.

Media Internet

Http://incas.menlhk.go.id/id/data/southsumatera, 2015.

"MONGABAY," (Online). Available: http:www.mongabay.co.id. (Accessed 24 10 2020).

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor Tahun 2016. http://jdih.sumselprov.go.id/index.php?m=pd&idx=perda&idv=Peraturan%20Gubernur%20Sumatera%20Selatan&tahun=2016

Trianto, D. (2021, 8 2). *nusantara.rmol.id*. Retrieved 9 17, 2021, from https://nusantara.rmol.id/read/2021/08/02/498864/90-hektare-lahan-di-sumsel-terbakar-selama-2021